

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA PETANI SWADAYA DESA MAJAPAHIT

Oleh:

Ramadan Agung Dermawan¹

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Alamat: Jl. Panam, Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota
Pekanbaru, Riau (28293).

Korespondensi Penulis: ramadhanagung11112002@gmail.com.

Abstract. *Rejuvenation of Smallholder Oil Palm is an effort to develop smallholder oil palm plantations by replacing old plants and plants that are no longer productive with new, certified plants. This Smallholder Oil Palm Rejuvenation program has been regulated in the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number: Number: 19 of 2023 concerning Rejuvenation of Oil Palm Plantations. In order to reduce problems regarding the productivity of smallholder oil palm plantations through rejuvenation of smallholder oil palm, it is believed to be the key link to increasing the productivity of smallholder oil palm plantations and can improve the welfare of farmers. This study aims to determine the success of the implementation program of smallholder oil palm rejuvenation in improving the welfare of independent farmers in Majapahit Village, Tapung District, Kampar Regency in 2023-2025 and the factors that inhibit the implementation of the smallholder oil palm rejuvenation policy. The theoretical concept used by researchers is the theory of policy implementation by Edward III. By using qualitative research methods and data collection techniques based on interviews, observation and documentation. The results of the research that the author obtained were that the implementation of the rejuvenation of smallholder oil palms for independent farmers in Sari Galuh Village still had several factors that were obstacles experienced by the Kampar Regency Plantation Service, so that the implementation of*

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA PETANI SWADAYA DESA MAJAPAHIT

the rejuvenation of smallholder oil palms for independent farmers was not yet effective and had not been implemented well and optimally.

Keywords: *Implementation, Smallholder Oil Palm Rejuvenation, Independent Smallholders.*

Abstrak. Peremajaan Sawit Rakyat ialah upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan melakukan penggantian tanaman tua dan tanaman yang tidak produktif lagi hasilnya dengan tanaman baru yang sudah bersertifikat. Program kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat ini telah diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: Nomor: 19 Tahun 2023 tentang Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam rangka mengurangi permasalahan mengenai produktivitas perkebunan sawit rakyat melalui peremajaan sawit rakyat diyakini menjadi kunci mata rantai untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui keberhasilan program implemementasi peremajaan sawit rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada petani swadaya di Desa Majapahit kecamatan Tapung kabupaten Kampar tahun 2023-2025 serta faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan peremajaan sawit rakyat. Konsep teori yang peneliti gunakan yaitu teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Dengan memakai metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang penulis dapat yaitu pelaksanaan implementasi peremajaan sawit rakyat pada petani swadaya Di Desa Sari Galuh masih memiliki beberapa faktor yang menjadi hambatan yang dialami oleh Dinas perkebunan kabupaten kampar, sehingga implementasi peremajaan sawit rakyat pada petani swadaya belum efektif dan belum terimplementasi dengan baik dan optimal.

Kata Kunci: Implementasi, Peremajaan Sawit Rakyat, Petani Swadaya.

LATAR BELAKANG

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan dikenal sebagai replanting ini merupakan upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan melakukan penggantian

tanaman tua dengan tanaman baru yang sudah bersertifikat. Program kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat ini telah diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2023 tentang Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. Bagi Provinsi Riau pembangunan sektor pertanian masih merupakan sektor yang penting dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah. Dan dalam upaya peningkatan produktivitas dan kualitas dari tandan buah segar yang dihasilkan serta mengurangi resiko pembukaan lahan illegal diindonesia, pemerintah membuat program nasional yang mana disebut dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Peremajaan sawit adalah proses penggantian tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif menjadi tanaman baru dengan penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP). Pada kenyataannya kegiatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih terhalang oleh ekspansi sawit rakyat yang masih berada pada kawasan hutan, hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ini. Dan juga dalam pelaksanaannya masih belum efektif karena dalam proses melakukan Peremajaan kelapa sawit seringkali ditunda pelaksanaannya dikarenakan berbagai faktor masalah yang dialami oleh petani maupun pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut, timbul ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan Implementasi Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Petani Swadaya Di Desa Majapahit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai lingkup yang sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah/Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bupati/Walikota. Berbicara mengenai kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom), meskipun dalam penerapan dan penggunaan keduanya sering dipersamakan. Kebijakan merupakan kesepakatan bersama dari berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat dan sudah

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA PETANI SWADAYA DESA MAJAPAHIT

disahkan oleh masyarakat itu sendiri melalui lembaga yang berwenang untuk dilaksanakan. Sedangkan kebijaksanaan merupakan suatu rangkaian tindakan dari aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi oleh personal/individu pejabat yang berwenang. Dengan demikian, yang ada terlebih dahulu adalah kebijakan, sedangkan kebijaksanaan ada setelah suatu kebijakan tersebut disepakati. Jadi tidak mungkin suatu kebijaksanaan timbul sebelum adanya kebijakan.

Menurut Thomas R. Dye Dalam Solichin (2012:14) kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang paling penting karena dalam implementasi kebijakan itu melibatkan sebuah proses yang sangat kompleks dan menyangkut banyak pihak. Menurut Kamus Webster dalam Wahab (2012:135), secara lexicografis merumuskan bahwa istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti *“to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) ; *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Dalam Sujianto (2008:31) mengemukakan bahwa implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, hasil dan sebagai suatu akibat. Dikatakan sebagai suatu proses implementasi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang dimaksud untuk menetapkan suatu keputusan otoritatif awal dari legislatif pusat kedalam suatu akibat atau efek. Maka ciri utama dari proses implementasi adalah kinerja yang

tepat waktu dan memuaskan. Sebagai hasil implementasi berkaitan dengan tingkat seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Peremajaan Sawit Rakyat

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit milik petani. Program ini memberikan dukungan finansial dan teknis untuk peremajaan tanaman kelapa sawit yang sudah tua atau tidak produktif, sehingga petani dapat meningkatkan hasil panen dan pendapatan mereka

Kesejahteraan Masyarakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kemakmuran sebagai kedamaian, kebahagiaan dan kesehatan. Kehidupan yang sejahtera ditandai dengan kondisi yang lebih baik, lingkungan yang lebih hijau, dan lebih sedikit penyakit menular. Namun, premi asuransi nasional berbeda-beda tergantung wilayahnya. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan pendapatan rumah tangga. Kemiskinan, lokasi, globalisasi, kurangnya kesempatan kerja, penyebaran populasi dan faktor-faktor lain dapat berkontribusi terhadap hal ini. Kesejahteraan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keseluruhan kualitas hidup suatu masyarakat atau individu di suatu tempat tertentu dari waktu ke waktu.

Kesejahteraan Masyarakat adalah kondisi di mana kebutuhan dasar individu dan keluarga dalam masyarakat terpenuhi dengan baik, baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. (Wulandari, 2019). Kesejahteraan ini mencakup akses yang memadai terhadap makanan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, serta lingkungan hidup yang bersih dan aman. Pemerintah sering kali berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan layanan publik, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kesejahteraan sangat berpengaruh terhadap pelaku usaha rumahan itu sendiri.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA PETANI SWADAYA DESA MAJAPAHIT

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus bentuk deskriptif. Artinya data yang penulis kumpulkan bukan berupa analisis angka-angka statistik, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini menggunakan deskriptif adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menambah dan mengurangi. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif agar peneliti dapat lebih dalam memahami dan menganalisis mengenai implementasi kebijakan peremajaan sawit rakyat pada petani swadaya di Desa Majapahit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Faktor yang pertama dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yakni komunikasi, sebagaimana dijelaskan oleh Menurut Edward III (dalam Widodo 2019:24-25) bahwa komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada para pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Instruksi dalam menjalankan suatu kebijakan harus ditransmisikan pada pelaksana yang tepat, serta kebijakan tersebut harus akurat, jelas serta konsisten. Dalam faktor komunikasi, setidaknya ada 3 komponen yang memengaruhi berhasilnya proses komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Suatu kebijakan tersebut mesti ditransmisikan kepada orang yang tepat sebelum akhirnya dapat dilaksanakan. Dalam proses komunikasi ini sangat dibutuhkan ketepatan pemberian informasi, serta komunikasi harus diterima oleh para pelaksana secara pasti.

Selain itu, jika mengharapkan implementasi kebijakan yang ideal, intruksi kebijakan tersebut mesti tidak hanya diterima, tetapi juga harus jelas.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai faktor komunikasi untuk melihat bagaimana transmisi, kejelasan serta konsistensi dalam penyampaian instruksi kepada implementor, dapat disimpulkan bahwa penyampaian instruksi dalam implementasi program Peremajaan Sawit ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang tertulis. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, segala instruksi mengenai pelaksanaan program Peremajaan sawit rakyat telah dijelaskan dengan mengikuti standar dan aturan, ditambah lagi juga diadakan penyuluhan mengenai program PSR sebelum pelaksanaan nya.

Sumber Daya

Faktor yang kedua yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah sumberdaya. Proses penyampaian implementasi kebijakan mungkin sudah dijelaskan secara akurat, jelas dan konsisten, tetapi jika para implementor kekurangan akan sumberdaya yang diperlukan dalam menjalankan suatu kebijakan, maka implementasi kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Sumberdaya tersebut terdiri dari staff/keanggotaan yang tepat yang mempunyai kemampuan sesuai kebutuhan; pengetahuan yang cukup serta sesuai mengenai penyampaian langkah-langkah untuk mengimplementasikan; kewenangan yang berguna dalam tanggungjawab bahwa sebuah kebijakan dilaksanakan sebagaimana mestinya serta beragam fasilitas seperti peralatan pendukung maupun finansial.

Sumberdaya yang paling mendukung dalam mengimplementasi kebijakan adalah staff atau sumber daya manusia. Staf untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan haruslah cukup dan mempunyai keahlian yang dibutuhkan, maksudnya adalah staff yang menjadi implementor kebijakan sebaiknya orang-orang berkualitas dan juga dilihat dari segi kuantitas haruslah memenuhi kebutuhan program tersebut. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan, faktor sumberdaya dalam implementasi peremajaan sawit rakyat sudah berjalan dengan cukup baik. Staff yang menjadi pelaksana program tersebut pun jika dilihat dari kualitas serta kuantitasnya sudah baik, mereka menjalankan tugas nya sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam implementasi program peremajaan sawit pada petani swadaya di desa majapahit tidak mengalami kekurangan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA PETANI SWADAYA DESA MAJAPAHIT

personil dan setiap pelaksana telah dibekali sebelum memulai pekerjaannya agar nantinya mereka benar-benar paham mengenai tugas masing-masing. Begitu pula dengan kewenangan dari masing-masing pelaksana, yang sudah sesuai dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat dan didukung dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025. Fasilitas dalam implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat juga sudah dapat dikatakan baik, Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar sudah memiliki fasilitas yang cukup dan memadai serta financial yang semuanya dibiayai oleh Negara.

Disposisi

Faktor ketiga yaitu faktor disposisi yang tak kalah penting dalam mencapai suatu keberhasilan dari implementasi kebijakan publik. Jika kebijakan ingin di implementasikan secara efektif, maka tidak hanya dibutuhkan implementor yang mengerti dan memahami apa yang harus dikerjakan serta memiliki kapasitas untuk melaksanakan sebuah pekerjaan, tetapi para implementor harus melaksanakan pekerjaan tersebut atas kemauan atau kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang peneliti lakukan untuk melihat mengenai disposisi dalam implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat pada petani swadaya di Desa Majapahit, maka dapat dianalisis bahwa faktor disposisi ini sudah berjalan dengan cukup baik. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu Petani yang mengikuti program PSR ini dalam wawancara, sikap ataupun perilaku yang diberikan oleh para pelaksana atau implementor dalam hal melayani sudah sangat baik. Hal tersebut sejalan juga dengan pernyataan dari Kabid Perkebunan Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa para pelaksana sudah menunjukkan sikap serta perilaku yang baik pula, tanggungjawab kerja serta komitmen yang baik terhadap program Peremajaan Sawit ini. Selanjutnya untuk stafing birokrasi, para pelaksana yang tergabung dalam satuan tugas program Peremajaan Sawit Rakyat ini juga telah disesuaikan dengan tugas serta jabatannya di Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, sebagai contohnya pelaksana yang menjadi Satgas Pendataan dan Peradministrasian mengenai calon petani PSR berasal dari sekretaris yakni

menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan mengenai kegiatan peradministrasian.

Struktur Birokrasi

Walaupun jika pada sumberdaya sudah memenuhi untuk menjalankan suatu kebijakan serta para pelaksana sudah mengerti dan memahami apa yang seharusnya dikerjakan serta memiliki keinginan dalam melakukannya, implementasi kebijakan masih belum dapat terlaksana secara efektif apabila ada kekurangan di dalam struktur birokrasinya. Pada faktor struktur birokrasi ini terdapat dua ciri-ciri utama yang dapat mempengaruhi suatu keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu prosedur pengoperasian standar (SOP) dan fragmentasi. SOP itu sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan dokumen yang isinya adalah petunjuk, poin-poin yang dapat dipahami serta alur kerja suatu organisasi atau instansi mengenai proses teknis guna memandu para implementor untuk melakukan suatu pekerjaan.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang peneliti lakukan, faktor terakhir yaitu mengenai struktur birokrasi dapat dikatakan belum berjalan secara ideal. Sebagaimana disebutkan oleh syafiq bahwa implementasi suatu kebijakan tidak bisa berjalan dengan baik apabila masih terjadi fragmentasi atau peyenanbaran tanggungjawab dalam implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat. Karena dalam pelaksanaannya masih diperlukan 4 instansi mengakibatkan lambannya proses birokrasi dalam pelaksanaan program, hal tersebut menyebabkan adanya keterlambatan dalam urusan administratif antar instansi yang berperan. Sedangkan untuk aspek SOP dapat dikatakan sudah cukup baik, karena semua SOP mengenai program Peremajaan Sawit Rakyat ini telah tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Replanting.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya terkait implementasi kebijakan peremajaan sawit rakyat pada petani swadaya di Desa Majapahit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan sawit rakyat pada petani swadaya di Desa Majapahit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa keberhasilan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA PETANI SWADAYA DESA MAJAPAHIT

implementasi kebijakan peremajaan sawit rakyat pada petani swadaya di Desa Majapahit dapat dikatakan cukup efektif jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya walaupun program ini belum terwujud secara ideal.

Faktor komunikasi menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan peremajaan sawit rakyat pada petani swadaya yang mana adanya penataan struktur organisasi yang kurang efektif dikarenakan tidak adanya satuan tugas khusus dalam melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ke lapangan sehingga menyebabkan sosialisasi yang kurang berkelanjutan yang mengakibatkan hanya sebagian petani yang mengetahui serta berminat untuk mengikuti program peremajaan sawit rakyat. Sedangkan pada indikator struktur birokrasi, adanya fragmentasi dalam proses birokrasinya yang menyebabkan keterlambatan dalam beberapa urusan administratif nya. Selain itu ditemukan juga beberapa hambatan dalam implementasinya yaitu penataan struktur organisasi yang kurang efektif sehingga menghambat kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan, lambatnya proses birokrasi akibat adanya fragmentasi birokrasi serta masih banyak nya lahan petani yang berada didalam kawasan hutan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Agustino, Leo. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung, 2008.
- Gulo. Metode Penelitian Kualitatif. Graha Ilmu: Yogyakarta, 2022
- Rian Nugroho. Kebijakan Publik Di Negara-negara Berkembang. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung, 2007
- Sujianto. Implementasi Kebijakan Publik Konsep Teori Dan Politik. PT Rineka Cipta: Jakarta, 2008
- Wahab, Abdul Solichin. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. PT Bumi Aksara: Jakarta, 2012
- Winarno, Budi. Kebijakan Publik. PT Buku Kita: Jakarta, 2008
- Yulianto Kadji., M. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik. UNG Press: Gorontalo, 2020

Jurnal

- A.Rahmawati. "Implementasi Kebijakan Replanting Kebun Kelapa Sawit terhadap sosial ekonomi Masyarakat." Jurnal Undip 12, (2022): 35-40
- Aditya, Rian, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia." Jurnal Komunikasi Hukum 6, no. 1 (2020): 123–135.
- Adiwisastro. "Implementasi Kebijakan Publik." Jurnal Kebijakan Publik 23, (2022): 27-30
- Agustino. "Implementasi Kebijakan program Pengembangan Komoditas". Jurnal Implementasi Kebijakan 32, (2022)
- Nawi. "Faktor sosial ekonomi pendorong dan penghambat terhadap Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat." Jurnal Kebijakan Publik 30, (2020): 57-60
- Nugroho. "Analisis Peremajaan (Replanting) Kebun Kelapa Sawit". Jurnal Fakultas Ekonomi Pembangunan 33, (2024): 25-27
- Syafiq, F. A. "Implementasi Kebijakan Pengoprasian Bus Trans Mataram. Jurnal Administrasi Negara 28, (2023): 32-35

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA PETANI SWADAYA DESA MAJAPAHIT

Widodo. “Faktor yang mempengaruhi kebijakan.” Jurnal Implentasi Kebijakan 25, (2018): 32-33.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 93 “*Tentang perkebunan kelapa sawit.*”

Peraturan Pemerinth (PP) Nomor 24 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 “*Tentang penggunaan dan penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.*”

Perpres Nomor 24 Tahun 2016 “*Tentang penghimpunan dan penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.*”

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 “*Tentang pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.*”

Peraturan Menteri Pertanian (PMP) Nomor: 33/Permentan/OT.140/7/2006 “*Tentang pengembangan perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan.*”

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2023 “*Tentang Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.*”